

KESENJANGAN ANTARA DESAIN KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN MENDALAM DALAM KURIKULUM MERDEKA: TINJAUAN LITERATUR PADA PENDIDIKAN DASAR

Ikhwan Jamil¹, Salman Hasan Ansori², Zasiyah Auliyatulloh³, Luthfi Khairunnisa⁴,
Dodo Murtado⁵

¹²³⁴⁵ MPI Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

¹ikhwanjamil28@gmail.com, ²2259100030@student.uinsgd.ac.id

³zasiyahalyth279@gmail.com, ⁴iluthfikhairunnisa@gmail.com

⁵dodo.murtado@uinsgd.ac.id

ABSTRACT

This study analyzes the gap between policy design and the implementation of deep learning within the Merdeka Curriculum in primary education. The research is motivated by the persistence of discrepancies between the intended policy of meaningful and student-centered learning and its actual implementation in classroom practices. A qualitative approach using a thematic literature review was employed by analyzing relevant national and international studies from 2015–2025 indexed in Scopus, ERIC, and SINTA. Data were collected through systematic documentation and analyzed using thematic analysis to identify patterns related to policy design, classroom implementation, teacher interpretation, and implementation barriers. The findings reveal that although the Merdeka Curriculum emphasizes deep learning as a core pedagogical approach, its implementation in primary schools remains limited and tends to focus on administrative compliance rather than meaningful learning practices. Teachers' varying interpretations, limited pedagogical understanding, and systemic constraints contribute significantly to the implementation gap. The study concludes that there is a substantial policy implementation gap between curriculum design and classroom reality. This indicates that successful curriculum reform requires not only sound policy design but also strong teacher capacity and systemic support at the school level.

Keywords: *Merdeka Curriculum, deep learning, policy gap, curriculum implementation, primary education*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasi pembelajaran deep learning dalam Kurikulum Merdeka pada pendidikan dasar. Kajian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan yang menekankan pembelajaran bermakna dan berpusat pada peserta didik dengan praktik pembelajaran di lapangan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan literatur tematik terhadap berbagai artikel ilmiah nasional dan internasional yang terindeks Scopus, ERIC, dan SINTA dalam rentang tahun 2015–2025. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan dianalisis menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola desain kebijakan, implementasi pembelajaran, interpretasi guru, serta faktor penghambat implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Kurikulum Merdeka telah mengarahkan pembelajaran pada pendekatan deep learning,

implementasinya di sekolah dasar masih terbatas dan cenderung berfokus pada aspek administratif dibandingkan pembelajaran bermakna. Perbedaan pemahaman guru, keterbatasan pedagogis, serta faktor sistemik menjadi penyebab utama kesenjangan implementasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kesenjangan kebijakan yang signifikan antara desain kurikulum dan realitas pembelajaran di kelas, sehingga keberhasilan implementasi kurikulum memerlukan penguatan kapasitas guru dan dukungan sistem pendidikan yang lebih optimal.

Kata kunci: Kurikulum Merdeka, deep learning, kesenjangan kebijakan, implementasi kurikulum, pendidikan dasar

A. Pendahuluan

Perkembangan pendidikan abad ke-21 ditandai oleh perubahan paradigma pembelajaran dari orientasi penguasaan materi secara hafalan menuju pembelajaran yang lebih bermakna (*meaningful learning*). Transformasi ini juga tercermin dalam pergeseran pendekatan pembelajaran dari *teacher-centered learning* menuju *student-centered learning* yang menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam proses konstruksi pengetahuan (De Corte, 2010; Wang & Zhang, 2018). Dalam konteks ini, pendidikan tidak lagi dipahami sebagai proses transfer informasi semata, melainkan sebagai proses pengembangan kompetensi abad ke-21 yang mencakup kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, komunikasi, dan pemecahan masalah. Pendidikan dasar memiliki posisi strategis sebagai fondasi utama dalam membentuk kemampuan

tersebut karena menjadi tahap awal pembentukan karakter belajar, literasi dasar, dan kompetensi kognitif peserta didik.

Seiring dengan tuntutan tersebut, sistem pendidikan di berbagai negara, termasuk Indonesia, mulai melakukan reformasi kurikulum untuk menjawab tantangan global, perkembangan teknologi, serta dampak krisis pembelajaran pascapandemi. Salah satu bentuk reformasi tersebut adalah penerapan Kurikulum Merdeka yang dirancang sebagai respons terhadap krisis pembelajaran (*learning loss*), kesenjangan capaian belajar, serta kebutuhan akan fleksibilitas pembelajaran (Kemendikbudristek, 2022). Kurikulum ini menekankan pembelajaran berbasis proyek, diferensiasi, serta penguatan Profil Pelajar Pancasila sebagai orientasi utama. Secara konseptual, Kurikulum Merdeka diarahkan untuk

menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna, kontekstual, dan berpusat pada peserta didik, bukan sekadar penyampaian konten akademik.

Dalam kerangka implementasinya, Kurikulum Merdeka memiliki keterkaitan konseptual dengan pendekatan pembelajaran mendalam (*deep learning approach*), yaitu pembelajaran yang menekankan pemahaman konsep secara mendalam, kemampuan refleksi, keterhubungan antarkonsep, serta kemampuan peserta didik dalam mengaitkan pengetahuan dengan konteks nyata. Pembelajaran mendalam berbeda secara fundamental dari *surface learning* yang cenderung menekankan hafalan dan reproduksi informasi tanpa pemahaman konseptual yang memadai (Biggs, 1996; Marton & Säljö, 1976). Pendekatan pembelajaran mendalam menuntut siswa untuk aktif membangun makna, mengintegrasikan pengetahuan, dan mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dengan demikian, Kurikulum Merdeka secara filosofis memiliki kesesuaian dengan paradigma konstruktivistik yang menempatkan pembelajaran sebagai proses aktif dalam membangun

pengetahuan, bukan sekadar menerima informasi secara pasif (Entwistle & McCune, 2004).

Namun demikian, realitas implementasi di lapangan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar, menunjukkan adanya berbagai tantangan yang cukup kompleks. Beberapa kajian menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka masih menghadapi persoalan pada aspek kesiapan guru, persepsi terhadap perubahan kurikulum, ketersediaan perangkat ajar, asesmen, serta dukungan sekolah (Angga et al., 2023; Astuti et al., 2023; Febrianningsih & Ramadan, 2023). Dalam praktiknya, implementasi kurikulum masih sering dipahami sebagai pemenuhan dokumen administratif, seperti penyusunan modul ajar, alur tujuan pembelajaran (ATP), dan perangkat kurikulum. Sementara itu, praktik pembelajaran yang mencerminkan pembelajaran mendalam, seperti eksplorasi konsep, refleksi, dialog, pemecahan masalah, dan pengaitan materi dengan pengalaman nyata peserta didik, belum sepenuhnya menjadi pola dominan di kelas.

Fenomena tersebut mengindikasikan adanya

kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasi di lapangan. Dari perspektif kebijakan publik, kondisi ini dapat dijelaskan melalui konsep *policy implementation gap* yang dikemukakan oleh Pressman dan Wildavsky (Pressman & Wildavsky, 1973), yaitu bahwa kebijakan yang dirancang secara ideal sering kali mengalami distorsi ketika diimplementasikan pada level praktik. Dalam konteks pendidikan, guru sebagai aktor utama implementasi kebijakan sering kali menjadi penafsir kebijakan (*street-level bureaucrat*) sebagaimana dijelaskan oleh Lipsky (Lipsky, 1980), sehingga pemahaman dan interpretasi mereka sangat memengaruhi hasil implementasi di kelas. Selain itu, teori implementasi kurikulum dari Fullan (Fullan, 2007) dan Spillane (Spillane, 2006) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kurikulum sangat dipengaruhi oleh konteks sekolah, kapasitas guru, budaya organisasi, serta proses interpretasi kebijakan di tingkat mikro.

Kajian-kajian terdahulu mengenai Kurikulum Merdeka umumnya telah membahas implementasi kurikulum di sekolah dasar, kesiapan guru, pengembangan

perangkat ajar, pembelajaran berdiferensiasi, serta penguatan Profil Pelajar Pancasila. Studi Astuti et al. (Astuti et al., 2023), misalnya, menyoroti implementasi Kurikulum Merdeka pada sekolah dasar yang berstatus mandiri berubah, sedangkan Febrianningsih dan Ramadan (Febrianningsih & Ramadan, 2023) menekankan kesiapan guru dalam melaksanakan Kurikulum Merdeka di sekolah dasar. Kajian Angga, Hernawan, dan Mulyati (Angga et al., 2023) juga membahas implementasi Kurikulum Merdeka dalam kaitannya dengan pengembangan Profil Pelajar Pancasila. Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut masih cenderung membahas implementasi Kurikulum Merdeka secara umum atau berfokus pada kesiapan administratif dan teknis guru. Kajian yang secara integratif menghubungkan desain kebijakan Kurikulum Merdeka, orientasi pembelajaran mendalam, interpretasi guru, dan *policy implementation gap* pada pendidikan dasar masih relatif terbatas. Padahal, integrasi keempat aspek tersebut penting untuk menjelaskan mengapa kebijakan yang secara konseptual menekankan pembelajaran bermakna belum

sepenuhnya terwujud dalam praktik pembelajaran di kelas.

Dalam perspektif pembelajaran, teori pembelajaran mendalam dari Marton dan Säljö (Marton & Säljö, 1976) serta prinsip *constructive alignment* dari Biggs (Biggs, 1996) memberikan landasan bahwa kualitas pembelajaran ditentukan oleh keselarasan antara tujuan pembelajaran, strategi pedagogis, asesmen, dan pengalaman belajar peserta didik. Studi terbaru juga menunjukkan bahwa pembelajaran mendalam membutuhkan desain aktivitas yang mendorong keterlibatan aktif, refleksi, pemecahan masalah, dan konstruksi makna oleh peserta didik (Weng et al., 2023). Dengan demikian, meskipun Kurikulum Merdeka secara konseptual telah mengarah pada penguatan pembelajaran mendalam, implementasinya sangat bergantung pada bagaimana guru memahami, menginterpretasikan, dan menerjemahkan konsep tersebut ke dalam praktik pembelajaran. Pada titik inilah muncul potensi kesenjangan antara desain kebijakan (*policy intent*) dan realitas praktik pembelajaran (*practice reality*).

Kebaruan artikel ini terletak pada upaya memosisikan pembelajaran mendalam sebagai lensa analisis untuk membaca kesenjangan antara desain Kurikulum Merdeka dan praktik pembelajaran di pendidikan dasar. Artikel ini tidak hanya menelaah implementasi Kurikulum Merdeka dari sisi kesiapan guru atau kelengkapan perangkat ajar, tetapi juga mengkaji bagaimana orientasi kebijakan yang menekankan pembelajaran bermakna mengalami proses interpretasi, translasi, dan kemungkinan distorsi pada level praktik kelas. Dengan demikian, artikel ini menawarkan kontribusi konseptual berupa pemetaan kesenjangan implementasi dalam tiga dimensi utama, yaitu kesenjangan konseptual, pedagogis, dan sistemik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis desain kebijakan pembelajaran mendalam dalam Kurikulum Merdeka, mengkaji kecenderungan implementasinya pada pendidikan dasar, serta mengidentifikasi bentuk kesenjangan yang terjadi antara kebijakan dan praktik pembelajaran. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang

menyebabkan munculnya *policy implementation gap*, terutama terkait pemahaman guru, kapasitas pedagogis, interpretasi kebijakan, dan dukungan sistem sekolah. Melalui tinjauan literatur tematik, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan kajian implementasi kebijakan kurikulum dan pengembangan strategi pembelajaran yang lebih bermakna pada jenjang pendidikan dasar.

Adapun sistematika penulisan artikel ini terdiri atas empat bagian utama. Bagian pertama membahas pendahuluan yang mencakup konteks, urgensi, landasan konseptual, kesenjangan penelitian, novelty, dan tujuan penelitian. Bagian kedua menjelaskan metode penelitian yang menggunakan pendekatan tinjauan literatur tematik. Bagian ketiga menyajikan hasil dan pembahasan yang mencakup analisis desain kebijakan, implementasi pembelajaran, interpretasi guru, serta identifikasi kesenjangan implementasi. Bagian terakhir menyajikan kesimpulan yang memuat implikasi kebijakan serta keterbatasan penelitian.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian berupa tinjauan literatur tematik (*thematic literature review*) untuk menganalisis kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasi pembelajaran mendalam (*deep learning approach*) dalam Kurikulum Merdeka pada pendidikan dasar. Tinjauan literatur digunakan karena memungkinkan peneliti mengidentifikasi, mengorganisasi, dan mensintesis temuan konseptual maupun empiris yang relevan dengan fokus kajian secara terarah (Grant & Booth, 2009; Snyder, 2019). Dalam konteks penelitian ini, tinjauan literatur tematik tidak dimaksudkan sebagai *systematic literature review* penuh, melainkan sebagai kajian berbasis sintesis tema untuk membaca pola konseptual, kecenderungan temuan, dan kesenjangan implementasi kebijakan pendidikan.

Sumber data penelitian ini berupa artikel jurnal nasional dan internasional, dokumen kebijakan resmi, serta literatur teoretis yang relevan dengan topik Kurikulum Merdeka, pembelajaran mendalam, implementasi kurikulum, kesiapan

guru, *teacher sensemaking*, dan *policy implementation gap*. Literatur difokuskan pada publikasi tahun 2015–2025 agar selaras dengan perkembangan kebijakan pendidikan terkini. Namun, beberapa teori klasik tetap digunakan sebagai landasan konseptual, seperti teori pembelajaran mendalam, *constructive alignment*, implementasi kebijakan, *street-level bureaucracy*, dan perubahan pendidikan.

Pencarian literatur dilakukan melalui beberapa basis data dan mesin pengindeks akademik, yaitu Google Scholar, Garuda, SINTA, ERIC, Scopus, dan ScienceDirect. Selain itu, platform penerbit seperti SpringerLink, Taylor & Francis Online, dan SAGE Journals digunakan sebagai jalur pelacakan tambahan untuk menemukan artikel internasional yang relevan. Dengan demikian, Springer, Elsevier, dan SAGE tidak diposisikan sebagai database utama, melainkan sebagai platform penerbit atau penyedia akses jurnal.

Kata kunci yang digunakan dalam pencarian meliputi kombinasi istilah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, seperti “Kurikulum Merdeka”, “implementasi Kurikulum Merdeka”,

“pembelajaran mendalam”, “deep learning approach”, “meaningful learning”, “student-centered learning”, “curriculum implementation”, “teacher readiness”, “teacher sensemaking”, “policy implementation gap”, dan “primary education”. Pencarian dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kata kunci pada masing-masing database agar memperoleh literatur yang paling relevan dengan fokus kajian.

Seleksi literatur dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah identifikasi awal terhadap artikel, dokumen kebijakan, dan literatur teoretis yang sesuai dengan topik. Tahap kedua adalah penyaringan berdasarkan judul, abstrak, tahun publikasi, dan kesesuaian dengan fokus pendidikan dasar. Tahap ketiga adalah pembacaan penuh terhadap literatur yang dinilai relevan untuk dianalisis secara tematik. Literatur yang dianalisis dipilih berdasarkan relevansi tema, kredibilitas sumber, dan kesesuaian dengan fokus pendidikan dasar.

Kriteria inklusi dalam penelitian ini meliputi: (1) artikel atau dokumen yang membahas Kurikulum Merdeka, implementasi kurikulum,

pembelajaran mendalam, kesiapan guru, kebijakan pendidikan, atau pendidikan dasar; (2) terbit dalam rentang 2015–2025, kecuali teori klasik yang relevan; (3) berasal dari jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, database akademik, atau dokumen kebijakan resmi; dan (4) tersedia dalam teks lengkap. Adapun kriteria eksklusi meliputi: (1) artikel populer nonakademik; (2) tulisan opini tanpa prosedur ilmiah; (3) artikel yang tidak relevan dengan pendidikan dasar atau implementasi kurikulum; (4) publikasi yang tidak memiliki identitas bibliografis memadai; dan (5) kajian tentang *deep learning* dalam arti kecerdasan buatan yang tidak berkaitan dengan pendekatan pedagogis.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik. Analisis tematik dipilih karena sesuai untuk mengidentifikasi pola makna, kategori, dan tema utama dari berbagai sumber literatur kualitatif maupun konseptual (Braun & Clarke, 2006; Nowell et al., 2017). Tahapan analisis meliputi pembacaan mendalam terhadap literatur, identifikasi unit makna, pengkodean terbuka (*open coding*), pengelompokan kode ke dalam tema,

dan sintesis tematik. Tema utama yang digunakan dalam analisis mencakup desain kebijakan pembelajaran mendalam, implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah dasar, interpretasi guru terhadap kebijakan, serta faktor penyebab kesenjangan implementasi.

Keabsahan sintesis diperkuat melalui triangulasi sumber literatur, perbandingan antarartikel, pemeriksaan konsistensi tema, serta keterhubungan antara temuan literatur dengan teori yang digunakan. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan dapat diperkuat melalui keterlacakan proses analisis, konsistensi interpretasi, dan kesesuaian antara data, tema, serta kesimpulan penelitian (Creswell & Poth, 2018; Miles et al., 2014). Dengan prosedur tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai kesenjangan antara desain kebijakan Kurikulum Merdeka dan implementasi pembelajaran mendalam pada pendidikan dasar.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Desain Kebijakan Pembelajaran Deep Learning Dalam Kurikulum Merdeka

Kajian literatur menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka merupakan bentuk reformasi kebijakan pendidikan yang menekankan pembelajaran bermakna (*meaningful learning*) dan penguatan kompetensi abad ke-21. Kebijakan ini menggeser paradigma pembelajaran dari *teacher-centered learning* menuju *student-centered learning* dengan memberi ruang lebih besar bagi peserta didik untuk mengonstruksi pengetahuan secara aktif. Dalam dokumen kebijakan, pembelajaran mendalam (*deep learning approach*) diposisikan sebagai pendekatan yang menekankan pemahaman konsep secara mendalam, refleksi kritis, keterhubungan antarkonsep, dan kemampuan mengaitkan pengetahuan dengan konteks kehidupan nyata (Kemendikbudristek 2022).

Secara konseptual, desain kebijakan tersebut sejalan dengan teori konstruktivisme yang memandang belajar sebagai proses aktif dalam membangun makna. Biggs (Biggs, 1996) melalui konsep

constructive alignment menegaskan bahwa keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh keselarasan antara tujuan, proses pembelajaran, dan asesmen. Studi terbaru juga menegaskan bahwa keselarasan antara tujuan, aktivitas belajar, dan asesmen dapat mendorong peserta didik pada pendekatan belajar yang lebih mendalam, bukan sekadar reproduksi informasi (Stamov Roßnagel et al., 2021).

Namun, desain kebijakan Kurikulum Merdeka masih memerlukan penerjemahan operasional yang kuat di tingkat sekolah. Fullan (Fullan, 2007) menjelaskan bahwa reformasi kurikulum tidak berjalan secara linear, karena keberhasilannya sangat bergantung pada kapasitas aktor, budaya sekolah, dan dukungan sistem. Dengan demikian, desain Kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran mendalam belum otomatis menjamin perubahan praktik pembelajaran apabila guru belum memiliki pemahaman konseptual dan pedagogis yang memadai.

Implementasi Pembelajaran Deep Learning Di Sekolah Dasar

Implementasi pembelajaran mendalam di sekolah dasar belum sepenuhnya berjalan optimal. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa praktik Kurikulum Merdeka masih sering berpusat pada aspek administratif, seperti penyusunan alur tujuan pembelajaran (ATP), modul ajar, perangkat asesmen, dan pemenuhan dokumen kurikulum. Sementara itu, praktik pembelajaran yang mencerminkan pembelajaran mendalam, seperti eksplorasi konsep, refleksi, pemecahan masalah, dan pengaitan materi dengan pengalaman nyata peserta didik, belum menjadi pola dominan di kelas.

Temuan ini sejalan dengan kajian Astuti et al. (Astuti et al., 2023) yang menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka pada sekolah dasar masih menghadapi persoalan persepsi guru dan penggunaan perangkat ajar yang cenderung mengikuti contoh dari pemerintah tanpa adaptasi mendalam terhadap karakteristik siswa dan konteks sekolah. Kajian Febrianningsih and Ramadan (Febrianningsih & Ramadan, 2023) juga menegaskan bahwa kesiapan

guru dalam melaksanakan Kurikulum Merdeka masih dipengaruhi oleh pemahaman guru, dukungan orang tua, serta ketersediaan sarana dan prasarana. Dengan demikian, problem implementasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan kapasitas guru dalam menerjemahkan kebijakan menjadi praktik pedagogis.

Guru sebagai aktor utama implementasi kebijakan memiliki posisi strategis dalam menentukan keberhasilan pembelajaran mendalam. Dalam perspektif Lipsky (Lipsky, 1980), guru dapat dipahami sebagai *street-level bureaucrat* yang tidak hanya menjalankan kebijakan, tetapi juga menafsirkan dan menyesuaikannya dengan kondisi kelas. Oleh karena itu, variasi pemahaman guru terhadap Kurikulum Merdeka menjadi faktor penting yang menentukan apakah kebijakan pembelajaran mendalam benar-benar terwujud sebagai pengalaman belajar yang bermakna atau hanya berhenti pada pemenuhan administratif.

Tema Sintesis	Temuan Utama	Makna Analitis	Sumber Teori
Desain kebijakan	Kurikulum Merdeka menekankan fleksibilitas, pembelajaran bermakna,	Secara normatif, desain kebijakan telah mengarah	Kemendikbu dristek (2022); Biggs (Biggs, 1996);

	diferensiasi, dan penguatan kompetensi abad ke-21.	pada pembelajaran yang lebih aktif dan berpusat pada peserta didik.	Roßnagel, Lo Baido, and Fitzallen (Stamov Roßnagel et al., 2021)
Implementasi pembelajaran	Praktik di sekolah dasar masih sering berfokus pada perangkat ajar, ATP, modul ajar, dan administrasi kurikulum.	Terjadi pergeseran dari orientasi pedagogis menuju kepatuhan administratif.	Astuti et al. (Astuti et al., 2023); Febrianning Sih and Ramadan (Febrianning Sih & Ramadan, 2023)
Interpretasi guru	Guru memiliki pemahaman yang beragam terhadap makna pembelajaran mendalam dan fleksibilitas kurikulum.	Guru menjadi aktor penafsir kebijakan, sehingga implementasi sangat dipengaruhi oleh proses <i>sensemaking</i> .	Lipsky (Lipsky, 1980); Spillane (Spillane, 2006); So, Lee, and Choi (2024)
Kesenjangan implementasi	Terdapat jarak antara tujuan kebijakan dan praktik pembelajaran di kelas.	Kesenjangan terjadi karena kebijakan mengalami proses translasi, adaptasi, bahkan distorsi di level sekolah.	Pressman and Wildavsky (Pressman & Wildavsky, 1973); Fullan (Fullan, 2007); Alhamuddin and Murniati (2025)
Faktor penghambat	Hambatan utama meliputi keterbatasan pemahaman guru, minimnya pelatihan	Implementasi Kurikulum Merdeka membutuhkan penguatan kapasitas	Iriawan, Hartati, and Robandi (2025); Pertiwi et al. (2023)

berbasis praktik, beban administratif, dan dukungan sistem yang belum merata.	guru dan ekosistem sekolah, bukan hanya sosialisasi kebijakan.	
---	--	--

Tabel 1. Sintesis Temuan Literatur Implementasi Kurikulum Merdeka dan Pembelajaran Mendalam

Tabel 1 memperlihatkan bahwa kesenjangan implementasi Kurikulum Merdeka tidak dapat dijelaskan hanya sebagai persoalan individu guru. Kesenjangan tersebut merupakan hasil interaksi antara desain kebijakan, interpretasi aktor, kesiapan sekolah, dan dukungan sistem pendidikan. Oleh sebab itu, pembelajaran mendalam perlu dipahami bukan hanya sebagai strategi mengajar, tetapi sebagai perubahan paradigma pedagogis yang memerlukan dukungan kelembagaan.

Kesenjangan Kebijakan Dan Implementasi (Policy Gap)

Sintesis literatur memperlihatkan adanya kesenjangan yang cukup nyata antara desain kebijakan Kurikulum Merdeka dan implementasi pembelajaran mendalam di sekolah dasar. Kesenjangan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga dimensi utama, yaitu kesenjangan konseptual, pedagogis, dan sistemik. Ketiga dimensi ini saling berkaitan dan

membentuk hambatan berlapis dalam proses implementasi kebijakan.

Kesenjangan konseptual terjadi ketika guru belum memiliki pemahaman yang utuh mengenai pembelajaran mendalam sebagai pendekatan yang menekankan pemahaman konseptual, refleksi, dan keterhubungan pengetahuan. Kesenjangan pedagogis tampak ketika strategi pembelajaran di kelas masih didominasi aktivitas prosedural, penyampaian materi, dan latihan rutin, sehingga belum sepenuhnya mendorong kemampuan berpikir tingkat tinggi. Sementara itu, kesenjangan sistemik muncul karena dukungan pelatihan, pendampingan, sumber daya, dan kebijakan operasional di tingkat sekolah belum merata.

Dalam perspektif kebijakan publik, fenomena tersebut sejalan dengan konsep *policy implementation gap* dari Pressman and Wildavsky (Pressman & Wildavsky, 1973), yang menegaskan bahwa kebijakan publik sering mengalami perubahan makna ketika diterjemahkan ke dalam praktik. Fullan (Fullan, 2007) juga menekankan bahwa perubahan pendidikan memerlukan kapasitas sistem, bukan sekadar dokumen

kebijakan. Dengan demikian, problem implementasi Kurikulum Merdeka perlu dibaca sebagai persoalan relasi antara kebijakan, aktor, dan konteks sekolah.

Interpretasi Guru Terhadap Kebijakan

Interpretasi guru terhadap kebijakan pembelajaran mendalam dalam Kurikulum Merdeka sangat menentukan bentuk implementasi di kelas. Sebagian guru masih memaknai pembelajaran mendalam sebagai variasi metode pembelajaran biasa, bukan sebagai pendekatan pedagogis yang menuntut pemahaman konsep, refleksi, dialog, dan keterlibatan aktif peserta didik. Akibatnya, praktik pembelajaran masih berpotensi berada pada level *surface learning*, yaitu pembelajaran yang lebih menekankan hafalan, penyelesaian tugas, dan pemenuhan target materi.

Spillane (Spillane, 2006) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh proses *sensemaking*, yaitu cara aktor di lapangan memahami, menafsirkan, dan memberi makna terhadap kebijakan. Kajian So, Lee, and Choi (So et al., 2024) juga menegaskan bahwa kebijakan kurikulum yang

memberi otonomi lebih besar kepada guru tetap akan diinterpretasikan secara berbeda bergantung pada pengalaman profesional, struktur sekolah, dan relasi sosial yang membentuk praktik guru. Artinya, kebijakan yang sama dapat menghasilkan praktik yang berbeda karena guru tidak berada dalam ruang implementasi yang netral.

Dalam konteks Kurikulum Merdeka, interpretasi guru menjadi titik krusial karena kebijakan ini memberi ruang fleksibilitas yang lebih besar kepada satuan pendidikan. Fleksibilitas tersebut dapat menjadi peluang bagi pembelajaran bermakna apabila guru memiliki literasi kurikulum dan kompetensi pedagogis yang kuat. Sebaliknya, fleksibilitas dapat berubah menjadi ketidakpastian praktik apabila guru belum memperoleh pendampingan yang memadai.

Faktor Penyebab Kesenjangan Implementasi

Jenis Gap	Deskripsi	Indikasi dalam Praktik	Dampak terhadap Pembelajaran	Implikasi Perbaikan
<i>Conceptual Gap</i>	Guru belum memahami pembelajaran mendalam sebagai pendekatan berbasis pemahaman konseptual, refleksi, dan koneksi antarkonsep.	Deep learning dipahami sebagai metode biasa atau sekadar aktivitas belajar yang bervariasi.	Pembelajaran cenderung kembali pada <i>surface learning</i> dan belum mendorong pemahaman mendalam.	Penguatan literasi kurikulum dan pelatihan konseptual tentang pembelajaran mendalam.

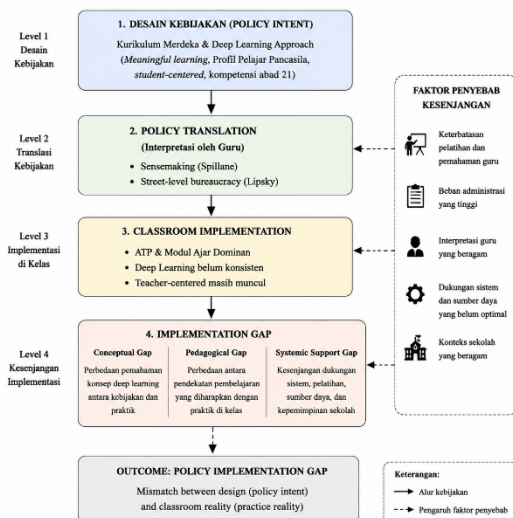
<i>Pedagogical Gap</i>	Strategi pembelajaran belum sepenuhnya selaras dengan tujuan Kurikulum Merdeka.	Aktivitas kelas masih dominan ceramah, latihan rutin, atau pemenuhan tugas administratif.	Peserta didik belum optimal dalam berpikir kritis, reflektif, dan kontekstual.	Pelatihan berbasis praktik, <i>lesson study</i> , supervisi akademik, dan pengembangan asesmen autentik.
<i>Systemic Gap</i>	Dukungan sekolah, pelatihan, sumber daya, dan pendampingan implementasi belum merata.	Guru menghadapi beban administratif, keterbatasan sarana, dan minimnya forum refleksi profesional.	Implementasi Kurikulum Merdeka tidak konsisten antarkelas dan antarsekolah.	Penguatan ekosistem sekolah, komunitas belajar guru, dan kebijakan pendampingan berkelanjutan.

Tabel 2. Klasifikasi Faktor Kesenjangan Implementasi Pembelajaran Mendalam dalam Kurikulum Merdeka

Faktor penyebab kesenjangan implementasi tidak berdiri sendiri. Keterbatasan pemahaman guru dapat memperlemah kualitas strategi pembelajaran, sementara lemahnya dukungan sistem dapat membuat guru kembali pada praktik lama yang lebih aman secara administratif. Dengan demikian, pembelajaran mendalam tidak cukup diperkuat melalui sosialisasi kebijakan, tetapi perlu didukung oleh pelatihan aplikatif, pendampingan kelas, komunitas belajar guru, dan supervisi akademik yang berkelanjutan.

Kajian Iriawan, Hartati, and Robandi (Iriawan et al., 2025) tentang implementasi pendekatan pembelajaran mendalam pada matematika sekolah dasar menunjukkan bahwa praktik pembelajaran mendalam memerlukan kesiapan guru dalam merancang

kegiatan awal, inti, dan penutup yang mendorong pemahaman konseptual, refleksi, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Sementara itu, Pertiwi et al. (Pertiwi et al., 2023) menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka pada literasi sains di sekolah dasar masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya dan pelatihan guru dalam menerapkan pendekatan yang lebih interaktif. Dua kajian tersebut memperkuat argumen bahwa kesenjangan implementasi terjadi pada level pedagogis sekaligus sistemik.



Gambar 1. Model Kesenjangan Kebijakan Pembelajaran Deep Learning
 Sumber: Adaptasi dari Pressman & Wildavsky (1973), Lipsky (1980), Spillane et al. (2002), dan Fullan (2007)

Gambar 1. Model Kesenjangan Implementasi Pembelajaran Deep Learning dalam Kurikulum Merdeka

Gambar 1 menggambarkan bahwa implementasi pembelajaran mendalam dalam Kurikulum Merdeka tidak berlangsung secara linear dari

kebijakan menuju praktik kelas. Kebijakan yang dirumuskan pada level desain (*policy intent*) perlu melalui proses translasi oleh guru sebelum menjadi praktik pembelajaran (*classroom implementation*). Pada proses translasi tersebut, kebijakan dapat mengalami penguatan, penyederhanaan, atau bahkan distorsi sesuai dengan pemahaman guru, kondisi sekolah, beban administratif, dan dukungan sistem yang tersedia.

Model ini menegaskan bahwa kesenjangan implementasi muncul dalam tiga bentuk utama, yaitu kesenjangan konseptual, pedagogis, dan sistemik. Kesenjangan konseptual berkaitan dengan pemahaman guru terhadap makna pembelajaran mendalam; kesenjangan pedagogis berkaitan dengan kemampuan menerjemahkan konsep tersebut ke dalam strategi pembelajaran; sedangkan kesenjangan sistemik berkaitan dengan dukungan institusional yang memungkinkan perubahan praktik berlangsung secara berkelanjutan. Dengan demikian, model ini dapat digunakan sebagai kerangka konseptual untuk membaca mengapa tujuan Kurikulum Merdeka belum

sepenuhnya terwujud dalam praktik pembelajaran di sekolah dasar.

Implikasi Konseptual dan Praktis Kesenjangan Implementasi

Secara keseluruhan, sintesis literatur menunjukkan bahwa kesenjangan antara desain kebijakan pembelajaran mendalam dalam Kurikulum Merdeka dan praktik pembelajaran di sekolah dasar tidak hanya disebabkan oleh kelemahan individu guru, tetapi juga oleh jarak antara orientasi normatif kebijakan dan kapasitas implementasi di tingkat sekolah. Kebijakan telah mengarahkan pembelajaran pada pemahaman mendalam, fleksibilitas, dan keberpusatan pada peserta didik. Namun, implementasi di kelas masih dipengaruhi oleh variasi pemahaman guru, dominasi tuntutan administratif, keterbatasan strategi pedagogis, serta dukungan sistem yang belum merata.

Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan Kurikulum Merdeka tidak cukup diukur dari tersedianya perangkat ajar atau terpenuhinya dokumen administrasi kurikulum. Keberhasilan implementasi perlu dilihat dari sejauh mana guru mampu menerjemahkan kebijakan menjadi pengalaman belajar yang bermakna, reflektif, kontekstual, dan mendorong

kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Oleh karena itu, penguatan literasi kurikulum, pelatihan pedagogis berbasis praktik, pendampingan guru, komunitas belajar profesional, serta pengurangan beban administratif menjadi prasyarat penting agar tujuan pembelajaran mendalam dalam Kurikulum Merdeka dapat lebih konsisten diwujudkan di pendidikan dasar.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara arah kebijakan Kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran deep learning dengan praktik pembelajaran di sekolah dasar. Secara konseptual, kebijakan tersebut telah mengarah pada penguatan pembelajaran bermakna dan pengembangan kompetensi abad ke-21. Namun dalam implementasinya, pembelajaran di kelas belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan tersebut.

Ketidaksesuaian tersebut tampak pada tiga hal utama, yaitu pemahaman konsep yang belum merata di kalangan guru, kecenderungan pembelajaran yang

masih bersifat prosedural, serta keterbatasan dukungan sistem pelaksanaan di sekolah. Hal ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada desain, tetapi juga pada kemampuan aktor dan kesiapan lingkungan pendidikan.

Dari temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka sangat ditentukan oleh keterhubungan antara kebijakan, kapasitas guru, dan dukungan institusi sekolah. Tanpa keselarasan ketiga aspek tersebut, tujuan pembelajaran mendalam sulit tercapai secara optimal di tingkat kelas.

Secara praktis, hasil penelitian ini mengisyaratkan perlunya penguatan pelatihan guru yang lebih aplikatif, khususnya dalam penerapan pembelajaran berbasis pemahaman mendalam. Selain itu, penyederhanaan beban administratif menjadi penting agar guru dapat lebih fokus pada proses pembelajaran. Penguatan pendampingan implementasi di tingkat sekolah juga diperlukan untuk mengurangi variasi pemahaman kebijakan di lapangan.

Ke depan, penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji

implementasi pembelajaran deep learning secara langsung di kelas melalui pendekatan empiris, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai dinamika praktik pembelajaran serta faktor kontekstual yang memengaruhinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhamuddin, & Murniati, A. (2025). Politics and Implementation Challenges in Indonesia's Curriculum Policy Transformation. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 17(2), 3421–3432.
<https://doi.org/10.35445/alishlah.v17i2.6452>
- Angga, Hernawan, A. H., & Mulyati, T. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) di Sekolah Dasar dalam Mengembangkan Profil Pelajar Pancasila. *Jurnal Elementaria Edukasia*, 6(3), 1290–1299.
<https://doi.org/10.31949/jee.v6i3.6107>
- Astuti, N. P. E., Lasmawan, I. W., Suastra, I. W., & Kusuma, K. N. (2023). Potret Implementasi Kurikulum Merdeka pada Sekolah Mandiri Berubah. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Pembelajaran*, 7(3), 458–467.
<https://doi.org/10.23887/jipp.v7i3.60476>
- Biggs, J. (1996). Enhancing teaching through constructive alignment. *Higher Education*.
<https://doi.org/10.1023/A:100375>

- 4215430
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches* (4th ed.). SAGE.
- De Corte, E. (2010). Historical Developments in the Understanding of Learning. In H. Dumont, D. Istance, & F. Benavides (Eds.), *The Nature of Learning: Using Research to Inspire Practice* (pp. 35–67). OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264086487-en>
- Entwistle, N., & McCune, V. (2004). The conceptual bases of study strategy inventories. *Educational Psychology Review*.
- Febrianningsih, R., & Ramadan, Z. H. (2023). Kesiapan Guru dalam Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Dasar. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(3), 3335–3344. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i3.4686>
- Fullan, M. (2007). *The New Meaning of Educational Change*. Routledge.
- Grant, M. J., & Booth, A. (2009). A Typology of Reviews: An Analysis of 14 Review Types and Associated Methodologies. *Health Information & Libraries Journal*, 26(2), 91–108. <https://doi.org/10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x>
- Iriawan, S. B., Hartati, T., & Robandi, B. (2025). Implementation of the Deep Learning Approach in Elementary School Mathematics Learning. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 17(4). <https://doi.org/10.35445/alishlah.v17i4.8834>
- Kemendikbudristek. (2022). *Kurikulum Merdeka: Panduan Implementasi Pembelajaran*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. <https://kurikulum.kemdikbud.go.id>
- Kementerian Pendidikan Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, K. (2022). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah*.
- Lipsky, M. (1980). *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. Russell Sage Foundation.
- Marton, F., & Säljö, R. (1976). On Qualitative Differences in Learning: I—Outcome and Process. *British Journal of Educational Psychology*, 46(1), 4–11. <https://doi.org/10.1111/j.2044-8279.1976.tb02980.x>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.

- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic Analysis: Striving to Meet the Trustworthiness Criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1–13. <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Pertiwi, R. P., Sinensis, A. R., Dewi, S. E. K., Dewi, T. R., & Septikasari, R. (2023). Implementation of Scientific Literacy in The Independent Curriculum (Merdeka Curriculum) at Elementary School. *JIP Jurnal Ilmiah PGMI*, 9(2), 136–144. <https://doi.org/10.19109/jip.v9i2.19875>
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1973). *Implementation*. University of California Press.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- So, K., Lee, S. Y., & Choi, Y. (2024). Teachers' Sense-Making of the Decentralizing Curriculum Reform Policy: A Comparative Case Study in South Korea. *International Journal of Educational Research*, 125, 102331. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2024.102331>
- Spillane, J. P. (2006). *Distributed Leadership*. Jossey-Bass.
- Stamov Roßnagel, C., Lo Baido, K., & Fitzallen, N. (2021). Revisiting the relationship between constructive alignment and learning approaches: A perceived alignment perspective. *PLoS ONE*, 16(8), 1–13. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0253949>
- Wang, S., & Zhang, D. (2018). Student-Centred Teaching, Deep Learning and Self-Reported Ability Improvement in Higher Education: Evidence from Mainland China. *Innovations in Education and Teaching International*. <https://doi.org/10.1080/14703297.2018.1490662>
- Weng, C., Chen, C., & Ai, X. (2023). A Pedagogical Study on Promoting Students' Deep Learning through Design-Based Learning. *International Journal of Technology and Design Education*, 33, 1653–1674. <https://doi.org/10.1007/s10798-022-09789-4>